# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di setiap daerah merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara optimal. Tujuan pembangunan ekonomi salah satunya adalah untuk pemerataan ekonomi, karena pemerataan ekonomi tanpa didukung oleh pembangunan ekonomi maka akan sulit untuk dicapai. Menurut (Arsyad, 2010), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses naiknya pendapatan rill per kapita di suatu negara dalam jangka panjang dan adanya keterkaitan antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi untuk dianalisis secara nasional maupun regional. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan faktor-faktor dalam proses naiknya pendapatan rill perkapita pada suatu negara guna melanjutkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat dianalisis secara nasional maupun regional atau antar suatu daerah.

Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mengatasi masalah disparitas pendapatan dan kemiskinan. Disparitas pendapatan merupakan salah satu permasalahan yang kompleks dan meresahkan di banyak wilayah di seluruh dunia, termasuk provinsi Sumatera Utara. Dengan keberagaman geografis dan demografisnya, provinsi Sumatera Utara memiliki tingkat disparitas pendapatan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial yang berbeda. Disparitas ini menjadi perhatian serius karena memiliki dampak yang luas, seperti ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan dan

kesehatan, kesenjangan dalam taraf hidup, dan bahkan ketegangan sosial. Salah satu penyebab utama disparitas pendapatan di Sumatera Utara adalah ketidakmerataan distribusi. Banyak negara berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi namun tidak diikuti dengan pemerataan yang baik, di era 1960-an mulai para ekonom menyadari bahwa pertumbuhan yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, pembangunan dan pemerataan atau distribusi.

Provinsi Sumatera Utara yang berkembang dengan pesat dan adanya pemekaran wilayah kabupaten/kota telah menambah jumlah kabupaten/kota menjadi 33 yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, 325 kecamatan dan 5.456 desa/kelurahan dengan ibukota provinsinya Medan. Pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara menunjukan kualitas yang semakin baik beberapa tahun terahir. Pertumbuhan ekonomi sumatera utara pada tahun 2020 tumbuh sebesar 4,73 persen dan pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,01 persen.

Analisis terhadap gini ratio antar provinsi di Pulau Sumatera selama periode 2021 hingga 2022 mengungkapkan bahwa provinsi Sumatera Utara menempati peringkat ketiga dalam hal tingkat ketimpangan. provinsi ini menunjukkan tingkat ketimpangan yang signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di antara penduduknya. Sumatera Utara berada di belakang provinsi Jambi, yang mencatatkan angka gini ratio yang sama, serta provinsi Sumatera Selatan dengan gini ratio sebesar 0,330. Meskipun berada di peringkat ketiga, angka gini ratio yang tinggi menyoroti tantangan dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

Menurut (Todaro, 2004) disparitas atau ketimpangan memiliki dampak yang positif maupun negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu suatu wilayah yang kurang maju dan berkembang akan terdorong untuk melakukan perbaikan sekaligus berkembang dalam persaingan dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraan wilayah yang kurang maju tersebut. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan antara lain adalah inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil untuk kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan pendapatan yang besar di suatu daerah telah menjadi hal yang umum dalam perkembangan wilayah tersebut. Disparitas ini tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga terlihat di tingkat provinsi atau unit administrasi yang lebih kecil, seperti Provinsi Sumatera Utara. Ketidaksetaraan ini sering kali menjadi sumber masalah serius bagi setiap daerah karena dapat memicu konflik finansial, sosial, atau merusak hubungan antarwilayah. Salah satu cara untuk mengukur disparitas pendapatan adalah melalui indeks Gini, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat dari kondisi perkembangan gini rasio kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara pada grafik berikut.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

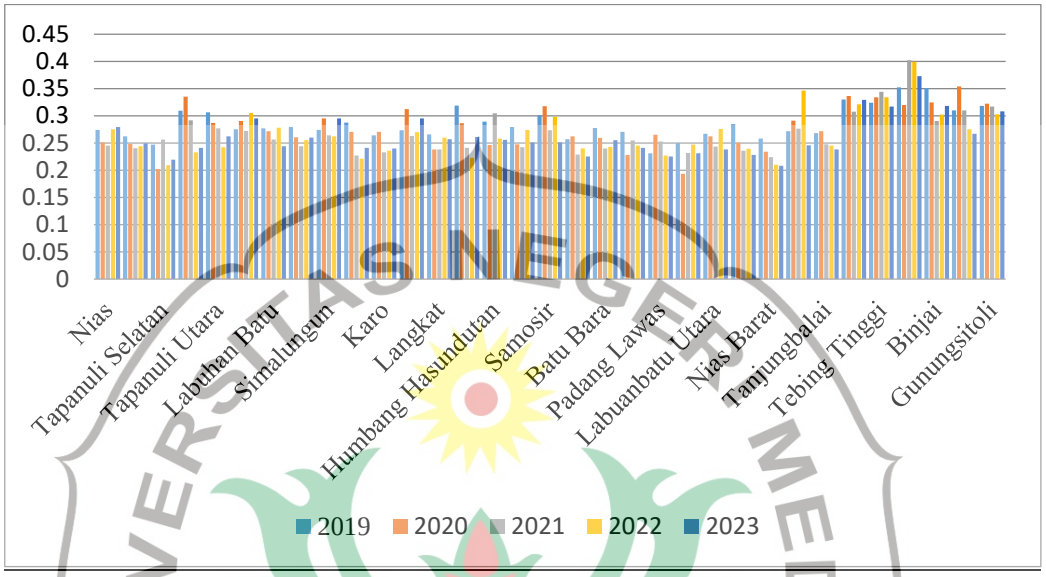


*Sumber : BPS Sumatera Utara*

**Gambar 1.1 Presentase tingkat disparitas pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2023.**

Berdasarkan Gambar 1.1 angka disparitas pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019-2023 sangat beragam. Daerah yang mengalami kenaikan gini ratio tertinggi pada tahun 2023 di provinsi Sumatera Utara terletak pada kota Pematang Siantar sebesar 0.329%, pada kota Binjai sebesar 0.318% dan pada kota Gunungsitoli sebesar 0.308%. Hal ini disebabkan oleh variasi pendapatan per kapita yang tinggi namun tidak diikuti oleh tingkat kualitas hidup yang seimbang, sehingga menciptakan kesenjangan yang luas antara pendapatan yang tinggi dan rendah di masyarakat.

Menurut Kuznets dalam Kuncoro (2004) pertumbuhan ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan. Namun bila negara tersebut sudah semakin maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan menurun. Akan

tetapi berdasarkan gambar 1.1 ketimpangan pendapatan di beberapa daerah Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan. Berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara yang justru mengalami kenaikan. Artinya, peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan menurunnya ketimpangan pendapatan.

Sedangkan daerah yang memiliki angka gini ratio terendah pada tahun 2023 terletak pada kabupaten Nias Barat sebesar 0.208%, pada kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 0.219% dan pada kabupaten Serdang bedagai sebesar 0.225%. Hal ini disebabkan oleh sektor industri pengolahan yang merupakan kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi yang positif. Diikuti oleh sektor pertanian, perdagangan besar, dan sektor eceran yang juga memberikan sumbangan yang signifikan. Ini disebabkan karena meningkatnya kesempatan ekonomi dan distribusi pendapatan yang lebih merata, disparitas pendapatan cenderung menurun. Sehingga daerah tersebut dapat menurunkan angka ketimpangan dan pengangguran.

Menurut (Todaro & Smith, 2006) para ekonom neo klasik disparitas pendapatan daerah cenderung berkurang seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bukti mengemukakan, dalam tahap awal pertumbuhan, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar empiris dari pandangan ini berdasarkan pengamatan di beberapa negara optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pada prakteknya cenderung mengurangi disparitas pendapatan dan kemiskinan.

Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi disparitas pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut (Musgrave, 1989) pendapatan asli

daerah yang diperoleh melalui berbagai pajak dan retribusi dapat meningkatkan disparitas pendapatan, terutama jika sistem pajak tidak progresif dan cenderung membebani kelompok berpenghasilan rendah lebih berat daripada kelompok berpenghasilan tinggi. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sector yang memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017: 23). Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

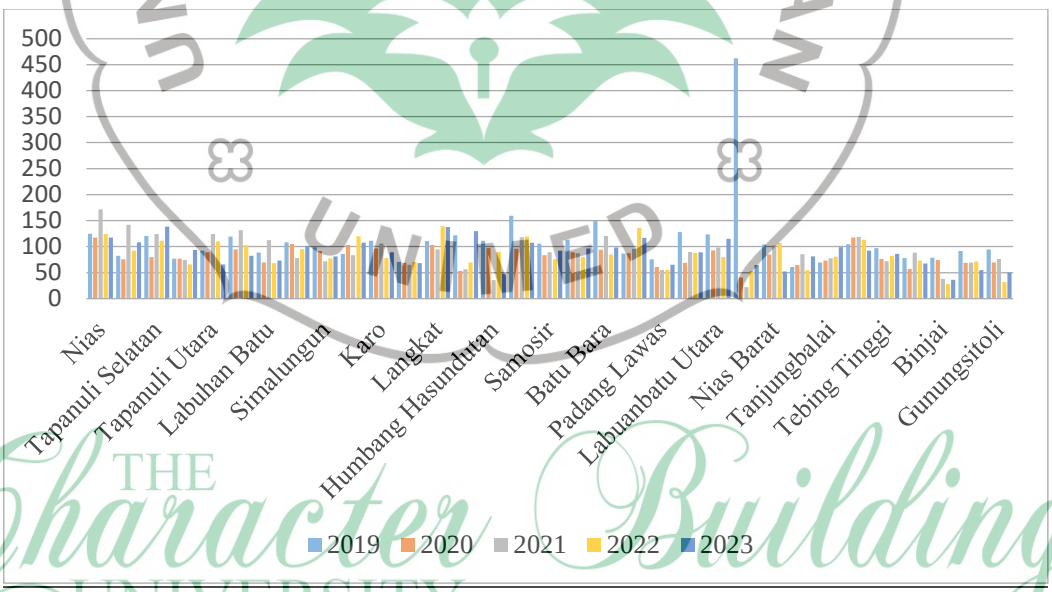


*Sumber : BPS Sumatera Utara*

**Gambar 1.2 Presentase tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2023.**

Dapat dilihat gambar diatas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2023 sangat beragam. Dimana angka tertinggi terjadi pada kabupaten Nias Utara yaitu sebesar Rp426,21 milyar pada

tahun 2019, kabupaten Nias sebesar Rp171,70 milyar pada tahun 2021 dan kabupaten Pakpak Bharat yaitu sebesar Rp159,33 milyar pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena kemampuan membayar pajak yang lebih tinggi di masyarakat, yang disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi dan sosial di daerah tersebut . Selain itu, pertumbuhan penduduk yang signifikan juga dapat meningkatkan pendapatan daerah, karena jumlah penduduk yang lebih besar dapat meningkatkan potensi pendapatan dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.

Sedangkan, tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah periode 2019-2023 terjadi pada kabupaten Nias Utara yaitu sebesar Rp21,83 milyar pada tahun 2021, kota Binjai sebesar Rp28.81 milyar pada tahun 2022 dan kabupaten Gunugsitoli sebesar Rp32.21 milyar pada tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan investasi, kurangnya pengusaha lokal yang berkembang, kekurangan inovasi dan kehadiran startup, serta kurangnya dukungan dan sinergi antara pemerintah daerah dan pengusaha lokal. Tanpa investasi yang cukup, potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, sementara kurangnya pengusaha lokal yang berkembang dapat membatasi pendapatan PAD.

Menurut (Stiglitz, J.E, 2000) pendapatan asli daerah sering kali mencerminkan disparitas ekonomi antarwilayah. Wilayah yang lebih kaya dapat mengumpulkan lebih banyak pendapatan asli daerah, yang selanjutnya dapat memperlebar kesenjangan pendapatan antarwilayah dan antarpenduduk.

Hal ini sejalan sebagaimana yang telah diuji oleh (Putri N & Natha. 2014.) dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif dan

signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jamiel dkk, 2022) dimana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif namun signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat. Tentunya *research gap* ini menjadi kajian yang menarik untuk mengungkap lebih lanjut pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap disparitas di kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Disamping karena Pendapatan Asli Daerah (PAD), disparitas pendapatan juga dapat disebabkan oleh pengeluaran perkapita. Menurut (Piketty, T. 2014) disparitas pendapatan terjadi ketika ada perbedaan signifikan dalam pendapatan yang diterima oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Jika pengeluaran per kapita meningkat, tetapi hanya sebagian kecil populasi yang menikmati peningkatan tersebut, maka disparitas pendapatan akan semakin lebar. Misalnya, jika orang kaya menghabiskan lebih banyak uang untuk barang mewah, sementara orang miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, maka ketimpangan akan meningkat.. Pengeluaran perkapita kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

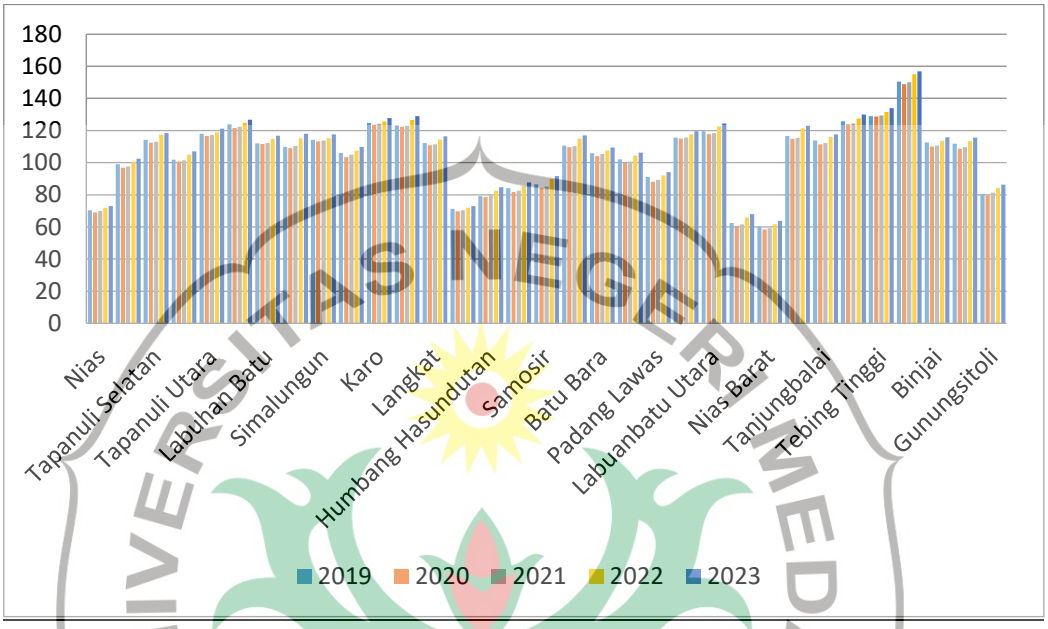


*Sumber : BPS Sumatera Utara*

**Gambar 1.3 Presentase tingkat Pengeluaran Perkapita di Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2023.**

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan Pengeluaran Perkapita di Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2023 mengalami keanekaragaman. Dimana tingkat pengeluaran perkapita di provinsi Sumatera Utara tiga tahun terakhir berturut-turut periode 2021-2023 terletak pada Kota Medan yaitu sebesar Rp15 juta pada tahun 2019, Rp15.5 juta pada tahun 2022 dan Rp15.6 juta pada tahun 2023. Hal ini terjadi dikarenakan kuatnya perekonomian, khususnya di sektor konstruksi dan manufaktur. Pertumbuhan ekonomi kota ini juga signifikan, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja perekonomian yang kuat tersebut, ditambah dengan pengeluaran per kapita yang tinggi, menjadikan Kota Medan memiliki pengeluaran per kapita tertinggi. Sedangkan tingkat pengeluaran perkapita periode 2019-2023 terendah terjadi pada kabupaten Nias Barat yaitu sebesar Rp5.8 juta. Hal ini terjadi disebabkan oleh

berbagai faktor, seperti rendahnya produktivitas di setiap sektor usaha, rendahnya pendapatan perkapita, dan tingginya kemiskinan di daerah tersebut. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengeluaran perkapita di daerah tersebut adalah luas lahan, pendidikan formal dan kompetensi petani.

Menurut (Todaro & Smith. 2006) distribusi pengeluaran per kapita merupakan salah satu ukuran penting dalam menganalisis ketimpangan pendapatan. Distribusi yang lebih merata dari pengeluaran per kapita dapat membantu mengurangi ketimpangan karena menunjukkan bahwa pendapatan digunakan secara lebih proporsional di seluruh populasi. Selain itu, teori dari (Arsyad, 2010) juga menyebutkan bahwa peningkatan pengeluaran per kapita secara merata dapat mengurangi disparitas pendapatan dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh distribusi yang lebih adil dari sumber daya ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan umum dan mengurangi disparitas antara kelompok pendapatan.

Teori ini diperkuat dengan suatu penelitian yang dilakukan oleh (Laila, N. N., dkk. 2024) bahwa Pengeluaran Perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Hal tersebut menunjukan bahwa peningkatan pengeluaran per kapita dapat menurunkan disparitas pendapatan. Hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tumbal J, dkk. 2023) yang menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Manado. Tentunya *research gap* ini menjadi kajian

yang menarik untuk mengungkap lebih lanjut pengaruh pengeluaran perkapita terhadap disparitas di kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi disparitas pendapatan adalah jumlah penduduk. Menurut Arsyad (1999), ketimpangan pendapatan regional disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk di ikuti dengan meningkatnya produktivitas tenaga kerja akan menaikan perekonomian. Namun, ketika pertambahan jumlah penduduk tidak didukung oleh peningkatan produktivitas akan menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut. Sehingga peningkatan jumlah penduduk dapat menghambat proses pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan masalah ketimpangan pendapatan. Jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

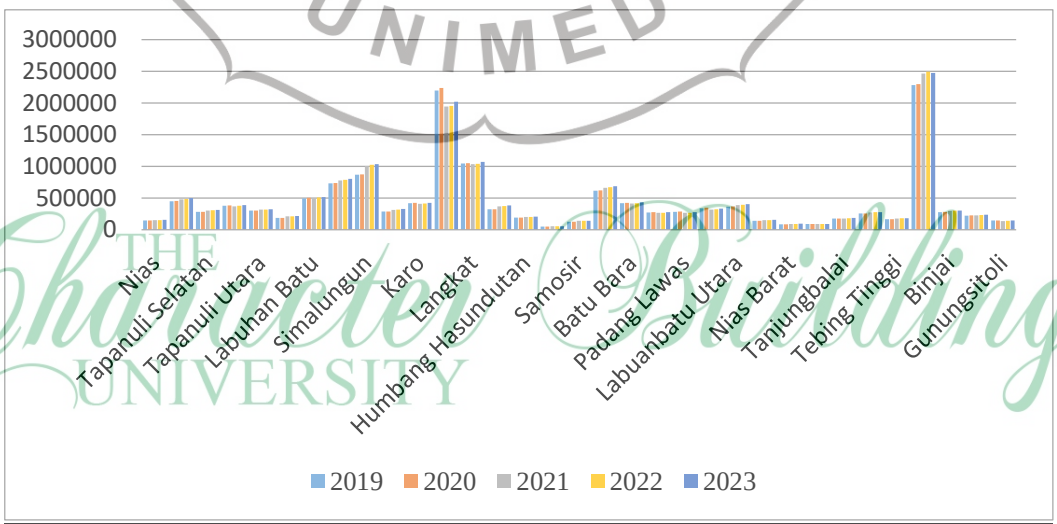


*Sumber : BPS Sumatera Utara*

**Grafik 1.4 Presentase tingkat Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2023.**

Dapat dilihat pada grafik 1.5 bahwa tingkat jumlah penduduk kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Dimana tingkat jumlah penduduk periode 2019-2023 tertinggi terletak pada Kota Medan sebesar 2.494.512 jiwa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Kota Medan merupakan wilayah dengan sebaran penduduk yang signifikan, sebagai pusat distribusi ekonomi baik dalam skala regional maupun nasional, memiliki potensi sumber daya alam yang kaya serta tingginya penduduk migrasi yang masuk.

Sementara tingkat jumlah penduduk periode 2019-2023 terendah terjadi pada kabupaten Pakpak Bharat yaitu sebesar 48.119 jiwa. Penyebab Kabupaten Pakpak Bharat memiliki jumlah penduduk terendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor kuncinya adalah karakteristik geografisnya, karena wilayah dengan medan yang menantang atau sumber daya yang terbatas seringkali memiliki populasi yang lebih kecil. Selain itu, peluang ekonomi dan pembangunan infrastruktur memainkan peran penting dalam distribusi populasi. Faktor sejarah seperti pola migrasi, pengaruh budaya, dan peristiwa masa lalu juga mempengaruhi jumlah penduduk di Kabupaten Pakpak Bharat.

Menurut (Sukirno, 2006) perkembangan jumlah penduduk merupakan faktor yang dapat mendorong dan menghambat di dalam pembangunan. Jumlah penduduk dikatakan sebagai faktor pendorong karena adanya kemungkinan semakin banyaknya tenaga kerja yang dihasilkan dan akan menjadikan perluasan pasar. Jumlah penduduk disebut sebagai faktor penghambat pembangunan dikarenakan akan memberikan penurunan dalam produktivitas serta terjadinya

banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini akan mengakibatkan tidak mampunya dalam memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya dan semakin memperluas tingkat disparitas pendapatan.

Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) menyebutkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di daerah Provinsi Jawa Timur. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Rahman R, Putri DZ. 2021) dimana jumlah penduduk berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di pulau Sumatera. Tentunya *research gap* ini menjadi kajian yang menarik untuk mengungkap lebih lanjut pengaruh jumlah penduduk terhadap disparitas di kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Teori Kuznets menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan antar daerah akan memberikan dampak perbedaan tingkat kesejahteraan daerah, yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah semakin besar. Permasalahan terkait ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang berkelanjutan sehingga menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mngkaji lebih mendalam terkait **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Disparitas Pendapatan Di Provinsi Sumatera Utara 2019-2023".**

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sehingga penelitian ini dipandang sebagai suatu hal yang baru, yaitu sebagai berikut :

1. Disparitas Pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dan banyak daerah yang memiliki ketimpangan yang berbeda.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi, ini membuktikan bahwa realisasi PAD dikatakan belum merata disetiap daerah.
3. Pengeluaran Perkapita kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
4. Jumlah Penduduk kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara meningkat setiap tahunnya

## 1.3 Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya cakupan masalah, (Sugiyono, 2017) mengatakan bahwa karena keterbatasan tenaga, keuangan, waktu, dan untuk lebih memperhatikan hasil penelitian, peneliti tidak meneliti seluruh objek atau situasi tertentu, tetapi menentukan fokus. Oleh karena itu penulis membatasi masalah menjadi :

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen disparitas pendapatan yang diukur dengan menggunakan indeks gini di provinsi Sumatera Utara 2019-2023.

2. Penelitian ini menggunakan variabel independen pendapatan asli daerah (PAD), pengeluaran perkapita, dan jumlah penduduk di provinsi Sumatera Utara 2019-2023.
3. Penelitian ini mengambil objek 33 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti mengembangkan pernyataan penelitian sebagi berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Utara?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pengeluaran perkapita terhadap disparitas di Sumatera Utara?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat jumlah penduduk terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Utara?
4. Apakah terdapat pengaruh tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat pengeluaran perkapita dan tingkat jumlah penduduk secara simultan terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Utara?

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Utara?

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat pengeluaran perkapita terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Utara?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat jumlah penduduk terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Utara?
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat pengeluaran perkapita dan tingkat jumlah penduduk secara simultan terhadap disparitas pendapatan di Sumatera Utara?

**1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam dua aspek, yaitu aspek empiris dan aspek praktis :

1. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi secara empiris yaitu memberikan kontribusi pada pengetahuan terhadap penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan khusus tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan.
2. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi secara Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan kontribusi dalam pengembangan penelitian yang akan datang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga terutama dalam bidang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan, serta sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY